

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.6. Tinjauan Pustaka	11
1.7. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORI.....	18
2.1. Landasan Teori	18
2.1.1. Konsep Relasi Elit Politik dalam Tata Kelola Pemerintahan.....	18
2.1.1.1. Relasi Elit Politik dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	19
2.1.1.2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	23
1. Transparansi dalam kepemimpinan	25
2. Transparansi melawan korupsi	26
2.1.2. Kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2.1.3. Konsep Desentralisasi dan Kelembagaan Pemerintah Inklusif.	31
2.1.3.1. Desentralisasi pemerintahan.....	32
2.1.1.2. Kelembagaan pemerintahan inklusif.....	35
2.1.4. Konsep Pembangunan berbasis manusia.....	38

2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian	43
2.2.1. Variabel Terikat: Kesejahteraan Masyarakat Aceh.....	44
2.2.2. Variabel Mediasi/Penghubung: Kelembagaan Pemerintah.....	45
2.2.3. Variabel Bebas	46
 BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Jenis Penelitian.....	49
3.2. Lokus dan Unit Analisis Penelitian	52
3.3. Populasi dan Sampel Penelitian.....	53
3.4. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	56
3.4.1. Teknik Pengumpulan Data.	56
3.4.2. Instrumen Penelitian.....	58
3.5. Pengolahan dan Analisis Data	61
3.5.1. Teknik Pengolahan Data	61
3.5.2. Teknik Analisis Data.....	62
 BAB IV TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	63
4.1. Reintegrasi dan Disharmoni Elit Politik Aceh Pasca Damai 2005	65
4.1.1. Reintegrasi dan Friksi Internal Elit Mantan Gerakan Aceh Merdeka.....	65
5.1.1.1. Reintegrasi mantan kombatan GAM	67
4.1.1.2. Dinamika friksi internal mantan GAM.....	71
4.1.2. Dominasi Partai Aceh dan friksi dengan Pemerintah Pusat.....	79
4.1.3. Friksi Etnisitas: Gayo-Aceh dalam Politik di Aceh.	84
4.2. Relasi Elit Sebagai Pimpinan Kelembagaan Pemerintahan Aceh.	85
4.2.1. Tingkat Hubungan Kerja Antar Tokoh di Aceh.....	86
4.2.2. Intensitas Persaingan dan Konflik Antar Elit Politik di Aceh.....	87
4.2.3. Cara Elit Politik Menyelesaikan Konflik.	93
4.3. Diskusi dan Kesimpulan Tata Kelola Pemerintahan Aceh Pasca 2005...95	
4.3.1. Diskusi: tata kelola pemerintahan dalam relasi elit politik di Aceh	96
4.3.1.1. Tata kelola pemerintahan dalam relasi antar elit politik.....	100
1. Konflik yang berkaitan dengan tantangan keberlanjutan perdamaian. .	101
2. Peran ulama sebagai pemersatu atau mediator konflik	107
4.3.1.2. Relasi antar elit di Aceh pasca damai 2005.	108

4.3.1.3. Bentuk rekomendasi penyelesaian konflik di Aceh.....	111
4.3.2. Kesimpulan tata kelola pemerintahan dalam relasi elit politik di Aceh....	113
4.3.2.1. Tingkat Hubungan Kerja Antar Tokoh di Aceh.	113
4.3.2.2. Intensitas Persaingan dan Konflik Antar Elit Politik di Aceh.	114

BAB V KEPEMIMPINAN DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM 117

5.1. Pemimpin Aceh Pasca Kesepahaman Damai Tahun 2005.....	118
5.2. Karakter dan Sikap Tanggung Jawab Pemimpin Aceh Pasca Kesepahaman Damai 2005	121
5.2.1. Karakter Pemimpin Aceh di Mata Masyarakat	122
5.2.1.1. Gagasan/Pemikiran Pemimpin dalam Mensejahterakan Masyarakat	132
5.2.1.2. Peran Pemimpin dalam Mensejahterakan Masyarakat	136
5.2.2. Sikap Tanggung Jawab Pemimpin Aceh Di Mata Masyarakat.....	139
5.2.2.1. Tingkat Keyakinan Masyarakat Terhadap Pemerintah Provinsi Dalam Menangani Permasalahan Pembangunan.....	140
5.2.2.2. Tingkat Keyakinan Masyarakat Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Menangani Permasalahan Pembangunan.....	149
5.3. Diskusi dan Kesimpulan Kepemimpinan di Aceh Pasca 2005	156
5.3.1. Diskusi kepemimpinan Aceh pasca 2005.....	157
5.3.1.1. Karakter kepemimpinan Aceh	160
5.3.1.2. Sikap tanggung jawab pemimpin Aceh	165
5.3.2. Kesimpulan kepemimpinan Aceh pasca 2005	173
5.3.2.1. Karakter pemimpin Aceh yang menyejahterakan belum kuat.....	173
5.3.2.2. Sikap tanggung jawab pemimpin Aceh belum inklusif	175

BAB VI KELEMBAGAAN POLITIK DAN EKONOMI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM.....177

6.1. Kelembagaan Pemerintahan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.....	179
6.1.1. Kelembagaan Politik Pemerintahan di Aceh.	179
6.1.1.1. Adopsi Kelembagaan Kerajaan Aceh Darussalam.	180
6.1.1.2. Kelembagaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.....	186
6.1.1.3. Kelembagaan Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh.....	188
6.1.2. Desentralisasi: Kelembagaan Ekonomi Provinsi Aceh.....	192

6.1.2.1. Inovasi Kebijakan dalam kelembagaan ekonomi di Aceh	193
6.1.2.2. Pergeseran pemimpin Aceh sebagai adaptasi kelembagaan ekonomi	196
6.1.2.3. Potensi konflik horizontal akibat kegagalan kelembagaan ekonomi	198
6.2. Transparansi Kepemimpinan di Aceh Atas Tata Kelola Pemerintahan .	199
6.2.1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.....	200
6.2.1.1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Pusat.....	201
6.2.1.2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi	203
6.2.1.3. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Kab/Kota	204
6.2.1.4. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan.....	205
6.2.1.5. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Gampoeng	206
6.2.2. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah	207
6.2.3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	214
6.2.4. Tingkat Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	216
6.2.5. Penilaian terhadap Tingkat Korupsi dalam Pemerintahan	220
6.2.6. Tingkat Transparansi Kepemimpinan Aceh	222
6.2.6.1. Transparansi Anggaran Pemerintah	223
6.2.6.2. Transparansi dalam Pemberantasan Korupsi	225
6.2.6.3. Transparansi dalam Penegakan Aturan.....	228
6.2.6.4. Transparansi dalam Kedisiplinan Bekerja	230
6.3. Diskusi dan Kesimpulan Kelembagaan Pemerintah di Aceh.	232
6.3.1. Diskusi Kelembagaan Pemerintahan Di Provinsi Aceh.....	233
6.3.1.1. Korupsi sebagai indikator kelembagaan politik yang masih ekstraktif ..	233
6.3.1.2. Kepemimpinan yang tidak transparan sebagai indikator kelembagaan ekonomi yang belum inklusif	237
6.3.2. Kesimpulan Kelembagaan Pemerintahan Di Provinsi Aceh	240
6.3.2.1. Kelembagaan ekonomi di Aceh masih ekstraktif	241
6.3.2.2. Kelembagaan politik di Aceh belum inklusif	244

BAB VII KESEJAHTERAAN SOSIAL SEBAGAI HASIL PEMBANGUNAN DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM.....245

7.1. Kesejahteraan Sosial di Aceh Pasca Damai 2005	246
7.1.1. Kemajuan Sektor-Sektor Pembangunan di Provinsi Aceh.....	247
7.1.1.1. Kemajuan Sektor Pendidikan.....	248

7.1.1.2. Kemajuan sektor kesehatan.....	251
7.1.1.3. Kemajuan pembangunan selain pendidikan dan kesehatan	252
7.1.2. Penilaian Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.	253
7.2. Kemajuan Sektor-Sektor Pembangunan Provinsi Aceh.....	254
7.2.1. Pembiayaan pembangunan Aceh.	254
7.2.2. Kemajuan sektor ekonomi bagi daya saing masyarakat Aceh	258
7.2.3. Manfaat kemajuan sektor ekonomi terhadap sosial.....	260
7.2.4. Manfaat kemajuan sektor ekonomi terhadap lingkungan.....	262
7.3. Kinerja Kelembagaan Pemerintahan Aceh.....	263
7.3.1. Kinerja Kelembagaan Politik Aceh: Alokasi DOKA dan SILPA.....	264
7.3.2. Kinerja Kelembagaan Ekonomi Pemerintahan Aceh Pasca 2005.....	270
7.3.2.1. Kinerja sektor pendidikan	270
7.3.2.2. Kinerja sektor kesehatan rendah	272
7.3.2.3. Kinerja sektor transportasi/infrastruktur jalan belum dapat memberikan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.....	272
7.3.2.4. Kinerja sektor industri belum mengangkat produk unggulan.....	275
7.3.2.5. Kinerja sektor pertanian disbanding sebelum 2005 buruk.....	275
7.3.2.6. Kinerja sektor perdagangan/jasa belum mampu memberikan daya dukung terhadap peningkatan produksi	279
7.3.2.7. Kinerja sektor perkebunan cukup baik dalam komoditas kopi.....	280
7.3.2.8. Kinerja sektor kelautan belum optimalkan potensi laut.....	281
7.4. Diskusi dan Kesimpulan Kesejahteraan Sosial di Aceh.....	282
7.4.1. Diskusi Kesejahteraan Sosial Hasil Pembangunan Di Provinsi Aceh	284
7.4.1.1. Kesejahteraan: Indeks Pembangunan Manusia Aceh.	285
7.4.1.2. Kesenjangan Ekonomi Aceh.....	290
7.4.1.3. Kepercayaan publik terhadap kelembagaan pemerintah di Aceh.	299
7.4.2. Kesimpulan Kesejahteraan Sosial Hasil Pembangunan Provinsi Aceh.....	301
7.5. Temuan Kebaruan Penelitian.....	302
 BAB VIII PENUTUP.....	 304
8.1. Kesimpulan.....	304
8.1.1. <i>Tata Kelola pemerintahan dalam bentuk disharmoni relasi antar elit politik di Aceh.</i>	306

8.1.2. *Perlunya peningkatan kapabilitas kepemimpinan dan mengurangi sikap partisan*

pemimpin di Aceh.308

8.1.3. *Kelembagaan Pemerintahan Aceh yang diwarnai oleh konflik kepentingan antar elit politik dan kepemimpinan yang kurang inovatif.*.....309

8.1.4. *Pembangunan di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Belum Optimal.* .311

8.2. Rekomendasi Akademis.313

8.2.1. *Tata Kelola Pemerintahan dalam relasi elit politik yang sehat.*314

8.2.2. *Kepemimpinan inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan.*.....315

8.2.3. *Kelembagaan pemerintahan Aceh yang mendukung pembangunan.*315

8.2.4. *Kesejahteraan Masyarakat dan Perdamaian Aceh belum optimal.*316

8.3. Saran Kebijakan.317

8.3.1. *Tata kelola pemerintahan yang baik dalam relasi elit politik sehat.*318

8.3.2. *Kepemimpinan inovatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan.*.....319

8.3.3. *Kelembagaan pemerintahan Aceh belum mendukung pembangunan.*320

8.3.4. *Pembangunan Aceh yang belum optimal menyediakan public good.*.....321

8.4. Keterbatasan Penelitian.322

Daftar Pustaka324

Lampiran 1. Peta Aceh1

Lampiran 1a. Peta Aceh dan Pembagian Kabupaten/Kota.....2

Lampiran 2. Pasangan Bupati dan Walikota Aceh3

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....1

Lampiran 4. Panduan Observasi Lapangan1

Lampiran 5. Panduan Wawancara6

Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian8

Lampiran 7. Persetujuan Publikasi ArtikelError! Bookmark not defined.